

PARTNERSHIP OF BANYUWANGI DISTRICT GOVERNMENT WITH PT. PELINDO IN MANAGEMENT OF GREEN WATU DODOL BANYUWANGI TOURISM

Sedarmayanti¹

Universitas Unitomo
sedarmayanti@yahoo.co.id

Sri Kamariyah²

Universitas Unitomo
srikamariyah@gmail.com

Received: January 25, 2020/ Reviewed: March 30, 2020/ Published: April 13, 2020

ABSTRACT

Ketapang is one of the villages that have abundant natural resources, but the human resources are still insufficient to enhance the existing tourism potential. The purpose of this research is to analyze comprehensively about Banyuwangi Regency Work Pattern with PT. Pelindo in managing Green Watu Dodol Tourism Object in Ketapang village, Banyuwangi regency, and also give suggestion or suggestion for optimal activity. This method of research is also a way of solving problems that must be done for scientific data and also as a means of seeking the truth with the steps that following existing provisions. In the process of printing, this scientific paper will be used the methods used as a guide in conducting research steps. The results of the research indicate that the authority of the Regional Government based on Article 12 paragraph (3) letter b Law no. 23 of 2014 on Regional Government, precisely the jurisdiction of the District Government in Article 30 of Law no. 10 the Year 2009 on Tourism. A lokal government with its authority may regulate, control, control and protect the community as well as natural resources and natural resources. The development of tourism is strived to be developed with the approach of growth and equity of the economy for the welfare of society and development oriented to the development of the region, relying on the community, and the nature of community members covering various aspects including business management cooperation. The government should be able to position development in existing development di Watu Dodol.

Keywords: Cooperation Pettern, Banyuwangi District Government, Tourism Management.

*correspondence author, email: srikamariyah@gmail.com

**Naskah diterima: 25 Januari 2020/ Naskah ditelaah : 30 Maret 2020/
Naskah dipublikasi : 13 April 2020**

**POLA KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI DENGAN PT. PELINDO DALAM
PENGELOLAAN WISATA GREEN WATU
DODOLBANYUWANGI**

ABSTRAK

Desa Ketapang merupakan salah satu desa yang memiliki Sumber daya alam yang melimpah namun Sumber daya manusianya masih kurang memadai untuk meningkatkan potensi wisata yang ada. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif tentang Pola Kerjasama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT.Pelindo dalam pengelolaan Obyek Wisata Green Watu Dodol di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi ,sertamemberikan bentuk saran atau rekomendasi kedepan terkait Optimalisasi Pengelolaan Obyek Wisata Green Watu Dodol. Metode kualitatif dengan penelitian ini juga merupakan suatu cara dalam memecahkan masalah yang harus dilakukan untuk memperoleh data ilmiah dan sekaligus sebagai sarana dalam mencari kebenaran ilmiah dengan langkah-langkah yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam proses penelitian karya ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pariwisata didasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara khusus kewenangan Pemerintah Kabupaten diatur dalam Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Pemerintah Daerah dengan kewenangannya tersebut dapat mengatur, mengarahkan, mengendalikan dan sekaligus pula melindungi masyarakat maupun Sumber daya alam dan Sumber daya buatan. Pembangunan kepariwisataan diupayakan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi kepada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek termasuk kerjasamaa usaha pengelolaan Pemerintah Daerah harus dapat memposisikan pariwisata dalam kerangka pembangunan yang ada di WatuDodol.

Kata Kunci: Pola Kerjasama, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pengelolaan Wisata.

PENDAHULUAN

Bangkitnya era Otonomi Daerah semakin memberikan peluang kepada setiap Daerah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Pemerintah Daerah memiliki kuasa penuh atas Daerah yang dipimpin, terutama pengolahan kekayaan Daerah yang dioptimalkan untuk kegiatan pariwisata. Menurut Andriyan (2011), pariwisata di era Otonomi Daerah adalah wujud dari cita-cita Bangsa Indonesia. Pariwisata jika dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat di sekitar Daerah Pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung pariwisata memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu Negara.

Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk 665.818 jiwa dari data statistik Kabupaten Banyuwangi dengan memiliki potensi pariwisata diantaranya potensi wisata Green Watu Dodol, Pulau merah, Gunung Ijen Bedul Boom Marina dan lainnya, sedangkan Green Watu Dodol berlokasi dipinggir jalan nasional menuju keluar masuk Pulau Bali dan Kabupaten Banyuwangi, adanya tempat wisata ini bagian dari tempat istirahat sejenak para wisatawan lokal maupun asing, yang mau menuju Pulau Bali. Green Watu Dodol merupakan sebuah obyek wisata laut yang harus dikembangkan terus oleh Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pantai ini terletak di Banyuwangi utara, memiliki topografi unik dengan bentuknya yang melengkung ke arah laut. Arah utara dari pantai ini, terhampar laut biru Selat Bali. Pantai ini merupakan salah satu dari sejumlah pantai di Jawa Timur yang populer di kalangan penikmat perjalanan.

Secara administratif, pantai ini terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bentuknya yang melengkung serta hutan kehijauan di tepian, pantai ini menyuguhkan sebuah lanskap indah. Barisan pepohonan Cemara Udang, kelapa, serta deretan pepohonan jati memberikan udara sejuk dan menghadirkan ketenangan di kawasan pantai tersebut.

Pada bagian hutan di pantai ini, dapat dilihat sejumlah satwa berkeliaran di pepohonan. Salah satunya adalah kera hitam, satwa yang kerap kali berebutan makanan di jalan masuk pantai tersebut. Suara kicauan burung juga terdengar sepanjang hari. Keberadaan hutan ini adalah salah satu pesona unik yang dimiliki oleh tempat wisata tersebut.

Kondisi saat ini potensi wisata dari perkembangannya dari tahun ke tahun cukup meningkat dari pembangunannya diantaranya ada fasilitas rest area serta fasilitas bermain untuk pengunjung, parkir mobil luas, aneka kerajinan tangan dan pernak pernik khas Banyuwangi yang tidak kalah pentingnya wisata kulinernya juga disediakan oleh pengelola.

Pengelolaan obyek wisata ini masih dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga kondisinya hanya sebatas potensi wisata biasa, belum ada peningkatan yang signifikan, padahal jika dikelola dan diprivatisasikan maka perkembangannya akan meningkat seperti contoh pariwisata yang ada di Kabupaten Lamongan yaitu Wisata Bahari Lamongan (WBL).

Bergulirnya UU 23 tahun 2014 kepada gilirannya memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk aktif melakukan pengelolaan atas sumber daya alam

desa agar memiliki nilai lebih. Dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada tersebut akan memberikan dampak bagi penguatan perekonomian desa.

Sebagaimana telah diketahui bahwa UU nomor 23 tahun 2014 telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola pariwisata bisa dikerjasamakan dengan desa untuk melakukan kerjasama dalam rangka memperkuat perekonomian desa. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara khusus kewenangan Pemerintah Kabupaten diatur dalam Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Oleh karena itu kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga guna memberikan nilai lebih atas sumber daya yang ada di desa menjadi dimungkinkan melalui aturan ini. Melalui kerja sama antar desa itu dimungkinkan terjadinya relasi antar desa yang bermanfaat. Mengingat dibalik kerjasama itu nantinya kan membuat desa-desa menjadi lebih kreatif dan inovatif guna menumbuhkan perekonomian desa. Jika dilihat secara filosofis terdapat unsur-unsur penguatan peran desa sebagai subyek pembangunan bagi dirinya sendiri untuk menumbuhkan daya saing desa.

Pemerintah Daerah dengan kewenangannya dapat mengatur, mengarahkan, mengendalikan dan sekaligus melindungi masyarakat maupun sumber daya alam dan Sumber daya buatan. Pembangunan kepariwisataan diupayakan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi kepada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek termasuk kerjasamaa usaha pengelolaan. Pemerintah daerah harus dapat memposisikan pariwisata dalam kerangka pembangunankepariwisataan diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang baik dan upaya-upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi haruslah segera berupaya menyusun kebijakan daerah dalam bidang pariwisata, khususnya Perda tentang Kerjasama Pola Kemitraan yang dilandasi dengan Kebijakan obyektif tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata sebagai detail perencanaan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang terpadu dan berkelanjutan. Bagaimana pola kerjasamaa pemerintah kabupaten Banyuwangi dengan PT.Pelindo dalam Pengelolaan Obyek Wisata Green Watu Dodol di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tentang pola kerjasama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT.Pelindo dalam Pengelolaan Obyek Wisata Green Watu Dodol di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi .

Kebijakan Publik

Dengan ruang lingkup yang lebih sempit, Wilson dalam Solichin Abdul Wahab (2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka

mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Hal senada dikemukakan oleh James E. Anderson dalam Ulul Albab (2007) yang mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Implementasi Kebijakan Publik

Sementara itu Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) mengatakan bahwa definisi implementasi adalah: Memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata kepada masyarakat (Wahab 1990).

Jadi pelaksanaan dapat dikatakan merupakan kemampuan yang tersusun untuk membentuk hubungan-hubungan yang lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan yang hendak tercapai.

Program-program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapai kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan Sumber daya alam dan Manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Wibawa, 1994).

Untuk mengoperasikan implementasi program agar tercapai suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi kepada organisasi pelaksanaannya.

Model efektifitas implementasi program yang ditawarkan oleh Edward III (1980), menyebutnya : Empat (4) faktor dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni: komunikasi, sumber daya manusia, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka suatu kebijakan yang

telah dirumuskan akan sia-sia. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan penting dalam proses kebijakan publik.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Oberlin Silalahi (1989) implementasi adalah interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau dengan kata lain kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan klausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Partnership

Menurut pendapat ahli, kemitraan memiliki pengertian sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004). Kemitraan merupakan salah satu tingkatan peran serta masyarakat dan memiliki pengertian sebagai adanya sharing power antara pihak masyarakat dan pihak pemegang kekuasaan bersarkan kesepakatan bersama (Panudju, 1999). Latar belakang kemitraan ini merupakan kritik terhadap pembangunan yang cenderung bersifat top down, dimana pemerintah mendominasi proses pembangunan dan mengabaikan sikap ketidakpedulian swasta terhadap kelompok lemah (Sulistiyani, 2004). Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahuikemitraan dalam konteks penelitian ini adalah adanya kesepakatan atau pembagian peran antara antara pemerintah, lembaga lokal, dan masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan lebih optimal. Terdapat tiga model kemitraan, antara lain sebagai berikut Sulistiyani (2004):

Pertama kemitraan semu. Kemitraan semu merupakan bentuk kemitraan tetapi terjadi ketidakseimbangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini dikarenakan salah satu pihak belum mengetahui secara pasti tujuan yang ingin dicapai dan makna di balik persekutuan tersebut. Kedua adalah Kemitraan Mutualistik, yang merupakan kemitraan yang mengadopsi simbiosis mutualisme dimana dua pihak yang melakukan kemitraan ini merupakan bentuk kemitraan yang dilatarbelakangi oleh kesadaran pentingnya melakukan kemitraan karena adanya saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih serta mencapai tujuan secara optimal. Ketiga adalah kemitraan melalui peleburan dan pengembangan, yang merupakan bentuk kemitraan dengan model konjugasi dimana masing-masing pihak kepada awalnya memiliki kekurangan dalam mencapai usaha dan tujuan. Di samping itu, dampak lain dari kemitraan model konjugasi terdapat peningkatan kapasitas.

Permasalahan pokok perumahan meliputi masalah kependudukan, baik yang menyangkut pertumbuhan maupun penyebarannya, masalah tata ruang dan pengembangan wilayah, masalah pertanahan yang semakin langka dan terbatas; masalah penyediaan prasarana, masalah pembiayaan yang menyangkut kemampuan ekonomis masyarakat untuk menjangkau harga rumah yang layak; masalah teknologi, industri bahan bangunan dan industri jasa konstruksi; masalah kelembagaan; masalah peran serta masyarakat; serta masalah peraturan perundang-undangan (Yudohusodo, 1991). Lambannya upaya untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat perumahan dan pemukiman yang sehat disebabkan belum terciptanya iklim yang memadai serta terbatasnya kemampuan Pemda untuk membiayai pembangunan perumahan dan pemukiman (Sastra, 2006). Untuk menjembatani kesenjangan tersebut maka perlu diupayakan sumber daya yang ada kepada masyarakat serta dunia usaha melalui penciptaan kondisi yang dapat mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kenyataan menunjukkan bahwa antara pemda, dunia usaha, dan masyarakat belum dapat bekerja sama secara optimal dalam menangani pembangunan perumahan dan pemukiman. Khususnya bagi Pemda, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membangun dan memelihara prasarana perumahan dan pemukiman, menciptakan mekanisme kemitraan yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan.

METODOLOGI

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Neuman (1989);

“Descriptive research presents a picture of the specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject”.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan metode pengumpulan data dan termasuk kategori data primer antara lain:

1) Pengamatan (observasi)

Observasi atau pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural (asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Observasi ini menelusuri aliran alamiah dari kehidupan sehari-hari para informan. Pengamatan atau observasi dilakukan dengan mengamati dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya sebatas pada pengamatan yang dilaksanakan dengan mata kepala saja, melainkan semua jenis pengamatan yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung (Sedarmayanti dan Hidayat, 2002). Dalam observasi yang dilakukan, peneliti melaksanakannya dengan cara datang ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung mengenai berbagai hal atau kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Dalam proses observasi, peneliti melakukan pencatatan terhadap *sample* data yang kemudian diwujudkan kedalam hasil wawancara.

2) Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan atas pertanyaan itu (Moleong, 2005:186). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan bertanya dan berhadapan secara langsung dengan orang yang dipilih sebagai sumber data. Adapun beberapa jenis wawancara yang dikemukakan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2010) adalah:

- (a) Wawancara terstruktur adalah pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan,
- (b) Wawancara semi-terstruktur, wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, namun pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur.
- (c) Wawancara tak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara tak terstruktur, hal ini dikarenakan obyek penelitiannya adalah suatu kegiatan adat dan subyek penelitiannya adalah masyarakat yang tergolong fanatik terhadap nilai-nilai islam. Selanjutnya penulis melakukan penyimakan terhadap pernyataan informan (Sudaryanto, 1993). Selanjutnya, simak dalam hal ini diwujudkan dalam teknik untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik simak bebas libat cakap (SBLC), karena penulis terlibat dalam dialog (Sudaryanto, 1993). Teknik pemerolehan data berikutnya adalah teknik catat yang merupakan teknik lanjutan. Menurut Sudaryanto (1993) pencatatan itu dapat dilakukan langsung ketika teknik pertama atau kedua selesai digunakan atau sesudah perekaman dilakukan dan dengan menggunakan alat tertentu. Dalam penelitian ini penulis mencatat sampel data yang berupa hasil wawancara mengenai implementasi kebijakan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Wilayah Green Watu Dodol di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi yang berbasis sumber daya manusia.

a. Data Skunder

Yang dimaksud dengan data skunder menurut Sedarmayanti dan Hidayat, (2002) adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (umumnya diperoleh melalui badan atau instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, misalnya Badan Pusat Statistik, data lembaga yaitu desa-desa di Pesisir Green Watu Dodol dan lain sebagainya).

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan dan termasuk dalam kategori data skunder adalah:

1) Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Adapun pengertian dokumen menurut Koentjaraningrat, (1997) yaitu data yang tercantum dalam pelbagai jenis itu merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, antara lain karena tidak dapat diobservasi lagi dan tidak dapat diingat lagi.

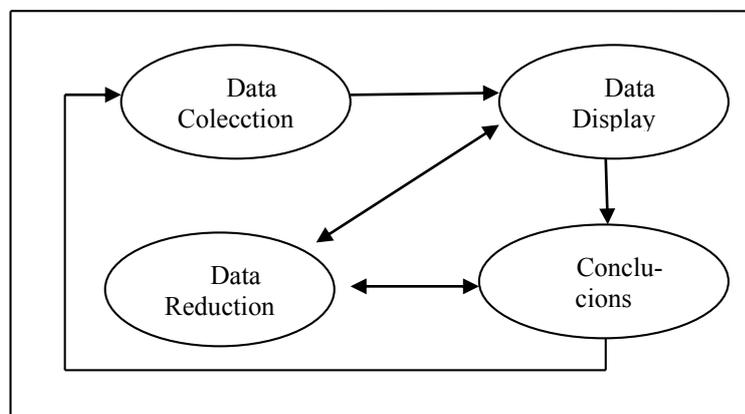
Jenis-jenis dokumen yang dipakai dalam penelitian ini antara lain: buku pedoman, laporan-laporan, kliping-kliping koran, serta dokumen dari instansi terkait yaitu lembaga terkait yang berhubungan dengan penelitian seperti desa-desa di Wilayah Green Watu Dodol atau pun tulisan dalam bentuk catatan lapangan oleh peneliti.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal dan lain-lain yang dapat memperkuat landasan teori guna dijadikan acuan atau pedoman dalam penelitian, dan berupa penelitian terdahulu.

Tahap akhir dari penelitian adalah menganalisa data yang diperoleh hingga menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Data-data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi selanjutnya dipelajari untuk kemudian dianalisis hingga didapatkan hasil penelitian yang komprehensif. Dalam skema analisis data, terdapat alur dalam proses analisis mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga terakhir yakni penarikan kesimpulan dari proses-proses analisis data tersebut.

Miles dan Huberman (1992) mengatakan, yang dimaksud dengan analisis data penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi). Ketiga jenis analisis tersebut sebagai suatu hal yang jalin-menjalin, baik sebelum, selama, maupun setelah pengumpulan data dalam bentuk sejajar. Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu merupakan suatu proses siklus yang *interaktif*. Selanjutnya tentang cara menganalisis data Sugiyono (2010) memberikan pendapat dari Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model analisa data dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3.1 Model Analisis data Miles dan Huberman

Sumber: Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010)

Dari skema di atas, dapat dilihat mengenai proses-proses analisis data, yakni sebagai berikut.

1. Pengumpulan data, merupakan kegiatan awal dalam suatu penelitian sehingga suatu karya tulis dapat dihasilkan.
2. Reduksi data, adalah proses pemilihan data-data pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga didapatkan pola dari proses reduksi data yang dilakukan.
3. Penyajian Data berguna untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dari proses penelitian. *Display* data atau penyajian data dapat berupa tulisan ataupun juga grafik.

Penarikan kesimpulan, adalah proses akhir dalam kegiatan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan didasari oleh hasil penelitian yang telah ada. Kesimpulan yang diambil dapat berupa deskripsi dari suatu obyek penelitian yang belum memiliki gambaran ataupun deskripsi yang terang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan produk wisata Banyuwangi berorientasi kepada potensi dan daya tarik budaya yang unik dan khas yang didukung oleh budaya, seni dan sejarah serta keindahan panorama alam. Produk wisata ini dikembangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kecenderungan pasar pariwisata yang berkembang, terutama tema-tema wisata minat khusus yang dapat menarik wisatawan asing. Dalam pengembangan produk wisata ini, diperlukan penetapan produk wisata andalan bagi Kabupaten Banyuwangi sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi di tingkat regional, nasional dan internasional. Dalam kaitannya dengan pengembangan produk wisata, obyek-obyek dan daya tarik wisata sejarah-budaya dan kesenian daerah serta event-event pariwisata masih harus didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan pemantapan pembinaan seni dan budaya dan penyelenggaraan event seni budaya tertentu. Salah satu contohnya yaitu diadakannya *event* tahunan *Banyuwangi Festifal 2017*.

Kebijakan Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Dalam pemasarannya, citra pariwisata menjadi sangat penting. Oleh karena itu perlu dibangun identitas jati diri dan citra yang menjadi tema utama pemasaran pariwisata Banyuwangi. Pemasaran dan promosi pariwisata di Daerah, pihak industri pariwisata bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D) bertanggung jawab atas upaya promosi paket wisata serta pelayanan pariwisata yang ditawarkan. Untuk mengembangkan segmen pasar wisatawan Banyuwangi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah melakukan beberapa hal yang diharapkan efektif untuk mempromosikan Banyuwangi di luar.

Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari produk kebudayaan dan pariwisata yang beragam, sesuai dengan identitas daerah. Penyiapan sumber daya manusia tidak hanya bagi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha pariwisata dan generasi muda, tetapi penting pula dipersiapkan berbagai penyuluhan mengenai pariwisata (peluang dan dampaknya) bagi masyarakat awam. Salah satu kebijakan yang sudah mulai dijalankan di bidang pengembangan SDM ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam kegiatan kepariwisataan di Daerahnya dengan bantuan untuk kelompok-kelompok usaha kecil di objek wisata tertentu. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan kemampuan komunikasi khususnya SDM yang berharapan langsung dengan wisatawan.

Secara sederhana, kelembagaan diartikan sebagai totalitas unsur-unsur kepariwisataan yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Meskipun merupakan bagian dari sistem kepariwisataan, namun aspek kelembagaan tidak mudah dibentuk dan tidak dapat bekerja secara otomatis. Peningkatan institusi/kelembagaan juga dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam rangka promosi pariwisata. Salah satu penerapannya yaitu menjalin kerjasama dengan *Travel Agencies*.

Kontribusi Sektor Pariwisata Green Watu Dodol terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Kebijakan yang efektif yang dikeluarkan oleh Pemerintah merupakan salah satu usaha untuk mengoptimalkan PAD. Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan dari setiap komponen PAD. Untuk Kabupaten Banyuwangi, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam kontribusinya terhadap PAD. Hasil analisis data realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi dari Dinas Pariwisata dapat dilihat kepada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Banyuwangi dari Green Watu Dodol

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2012	250.000.000	226.421.500
2	2013	300.000.000	291.532.000
3	2014	350.000.000	376.620.000
4	2015	400.000.000	387.873.500
5	2016	600.000.000	693.441.000

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Banyuwangi cukup signifikan naiknya setiap tahun, bahkan setakah Green Watu Dodol diperbaiki kepada tahun 2016 maka kenaikan PAD melebihi dari target.

Pola kerjasama pengelolaan Green Watu Dodol Banyuwangi. Pengelolaan Green Watu Dodol selama ini dikelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan sharing bagi hasil dengan beberapa lembaga diantaranya PT. Pelindo III yang memiliki lahan, pemerintah desa Ketapang, Masyarakat sekitar, Dinas pariwisata dan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Banyuwangi.

Wilayah Green Watu Dodol memiliki banyak sekali sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari hasil ikan lautnya yang melimpah, dibuktikan dengan banyaknya nelayan yang mencari ikan di wilayah tersebut, dengan ombak yang masih relatif kecil sehingga memudahkan proses pencarian ikan. Yang menjadi sumber daya tarik yang utama adalah panorama wilayah Green Watu Dodol yang menakutkan dengan pemandangan pulau bali yang begitu indah. Wilayah ini memiliki garis pantai yang panjang. Dengan panorama laut dan dasar lautnya yang sangat baik. Melalui berbagai kegiatan dimungkinkan untuk membantu pembangunan desa dan meningkatkan pendapatan untuk digunakan sebagai bagian utama pemberdayaan manusia di wilayah Green Watu Dodol.

Desa Ketapang yang termasuk didalam salah satu wilayah Green Watu Dodol ini mencoba untuk memaksimalkan pesona alam yang dimiliki diwilayahnya. Memang sejauh ini yang memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan wilayah Green Watu Dodol adalah pengelola Green Watu Dodol, yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk menggiatkan pembangunan destinasi wisata di wilayah Green Watu Dodol. Namun desa juga memiliki keuntungan dari hasil bagi atas obyek wisata tersebut melalui system bagi hasil, tetapi pengelola utamanya adalah Manajemen Green Watu Dodol.

Beberapa alternatif bagi desa dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi lebih besar. Namun memang saat ini masih belum maksimal dalam pengelolaan Green Watu Dodol.

Kepada awal penelitian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yogi selaku Pengelola Green Watu Dodol, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yogi dengan tujuan untuk pola kerjasamaa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogi diperoleh hasil wawancara sebagai berikut,

Dalam pengelolaan Green Watu Dodol perlu ketekunan dan manajemen yang baik, karena di wilayah sini ada banyak lembaga diantaranya: PT. Pelindo, PT. Pertamina, Dinas Pariwisata dan Lingkungan hidup, aspek muatan pariwisata sangat tinggi karena orang mau berkunjung pada umumnya istirahat di Green Watu Dodol ini karena akses masuk mudah, parkir luas dan tiket masuknya murah perorang hanya 5000 Rupiah saja. Dalam pengelolaan ini kami disediakan beberapa fasilitas seperti: pusat oleh-oleh permainan anak, perahu wisata serta gazebo yang dilengkapi dengan colokan untuk charge HP, sehingga para wisatawan lokal maupun mancanegara bisa nyaman dalam berwisata. (Tanggal, 15 Juli 2017).

Penjelasan yang diberikan oleh Pak Yogi di atas, dapat diperoleh pengertian bahwa wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh desa memiliki fungsi pengoptimalan pemasukan desa. Desa memiliki kebijakan berupa Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan wisata tersebut. Melalui peraturan itu pedagang dan wisatawan yang melakukan kunjungan ke sana dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah desa.

Berdasarkan kepada UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Desa Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pariwisata didasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara khusus kewenangan Pemerintah Kabupaten diatur dalam Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Pemerintah Daerah dengan kewenangannya tersebut dapat mengatur, mengarahkan, mengendalikan dan sekaligus pula melindungi masyarakat maupun sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pembangunan kepariwisataan diupayakan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi kepada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek termasuk kerjasamaa usaha pengelolaan. Pemerintah daerah harus dapat memposisikan pariwisata dalam kerangka pembangunan kepariwisataan dengan diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang baik dan upaya-upaya peningkatankompetensi sumber daya manusia yang berkualitas., se-

hingga jika desa mampu menangkap angin segar ini maka desa akan lebih mandiri dan kuat dalam menyongsong perubahan zaman yang terus berubah dengan cepat.

Pembangunan wilayah Green Watu Dodol dilakukan semakin baik saat ini. Dengan data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Banyuwangi dari Green Watu Dodol. Berikut ini merupakan Data Target dan Realisasi tersebut yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Banyuwangi dari Green Watu Dodol

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2016	600.000.000	693.441.000
2	2017	700.000.000	823.322.000
3	2018	800.000.000	932.150.000
4	2019	1.040.000.000	1.231.298.500
5	2020	1.500.000.000	693.441.000

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019

Di wilayah wisata juga terjadi pembangunan fasilitas bagi wisatawan yang semakin baik. Melalui wawancara dengan salah satu petugas Bapak Eko Wahono, yaitu sebagai berikut.

Saya kerja disini ya sudah cukup lama kira-kira 7 tahunan. Memang selama ini dalam pengelolaan yang bekerja secara penuh dalam arti kewenangannya besar ya pengelola. Kami melakukan berbagai program setiap tahunnya, salah satunya yang utama adalah pembangunan fasilitas wisata. Dulu tempat ini tidak layak untuk dibuat wisata, tetapi karena pemandangannya cukup bagus maka dengan program pemerintah akhirnya Green Watu Dodol ini diperbaiki pelan pelan dengan dibangun kepada tahun 2015, disamping itu kami juga membuat rumah makan dan tempat untuk nomgkrong-nongkrong bagi wisatawan, fasilitasnya coba kami perbaiki setiap tahunnya. Kalau untuk bagi hasil terhadap pemerintah desa itu setahu saya ada 5% dari keuntungan yang diberikan kepada pihak pemerintah desa. Hal yang biasa kami lakukan salah satunya juga melalui pendekatan kepada warga desa, sebagian besar yang berjualan disini itu ya warga lokal, terutama orang di Desa Ketapang. Dengan itu sebenarnya kami berharap warga menjadi lebih diberdayakan dalam proses peningkatan wisata Green Watu Dodol ini, Kami juga pernah beberapa kali melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pedagang yang ada dikawasan wisata. (Tanggal, 5 Juli 2017).

Wawancara yang serupa untuk konfirmasi data juga peneliti lakukan terhadap pedagang yang ada dikawasan wisata Green Watu Dodol. Bapak Dul namanya, yang menjelaskan mengenai ketika dia berdagang dan bagaimana pengelolaan Green Watu Dodol yang selama ini yang telah dirasakan dampaknya Bapak Dul, sebagaimana dibawah ini.

Saya berdagang disini sudah puluhan tahun. Memang terjadi perbaikan, alhamdulillah. Fasilitas juga lebih baik, tapi untuk pengunjung memang setiap hari ada. Namunn yang paling ramai biasanya hari libur nasional, libur panjang, kalau hari-hari biasa ya begini, agak sepi. Tapi rejeki sudah ada yang mengatur. Kami (pedagang) biasa melakukan kegiatan ya dari pagi sampai malam hari, kalauramai bisa 24 jam buka. Kami juga membayar retribusi ke petugas. Ya, Uang kebersihan dan kamanan gitu, memang kami wajib melakukan itu karena itu merupakan kewajiban kami, ya semoga dengan demikian wisata Green Watu Dodol tetap ramai. Kami biasa bergadag disini tentunya berharap semoga jualan kami tetap laku dan ramai, keluarga saya ya saya hidupi melalui berdagang disini. Kalau untuk pengelolaan atau pelatihan saya rasa masih sangat jarang, saya saja ngalami Cuma 1 kali, itu sudah sangat lama. (Tanggal, 8 Juli 2017).

Berdasarkan keterangan dari Bapak Dul dapat diketahui bahwa pengelolaan Green Watu Dodol telah mengalami perbaikan dalam makna secara infrastruktur atau fasilitas wisata. Namun dalam hal pengelolaan sumber daya manusia memang masih kurang maksimal. Namun dapat diketahui bahwa pedagang telah memahami pentingnya retribusi yang diberikan kepada pihak terkait untuk pengembangan wisata Green Watu Dodol. Selanjutnya menurut Bapak Sis kemajuan yang telah dilakukan oleh pihak Pengelola Green Watu Dodol adalah melakukan pembangunan fasilitas wisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar, namun sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wasil yang dilakukan selama ini masih kurang maksimal dalam program pemberdayaan yang dilakukan.

Kemudian wawancara juga peneliti lakukan terhadap pedagang lainnya guna memperoleh data lain terkait pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar dalam hal ini adalah pedagang yang ada di wisata Green Watu Dodol. Ibu Sisna merupakan salah satu pedagang yang baru beberapa tahun berjualan yang diwilayah Green Watu Dodol, berikut keterangan dari Ibu Sisna.

Saya baru 2 tahunan berjualan disini, jualan minuman dan makanan. Selama disini Alhamdulillah bisa membantu kebutuhan keluarga. Memang masih ada pungli yang terjadi disekitar wisata ini. Memang bukan saya yang mengalami, tapi teman saya yang jualan disebelah sana.. Sejauh ini, pengelolaan dari pertama jualan sampai saat ini ada perbaikan kayak gapura itu yang diperbagus. Ada juga pembangunan fasilitas seperti kamar mandi dan hotel-hotel juga banyak yang didirikan, yang baru-baru juga banya. Kalau retribusi disini ya kami melakukan pembayarannya setiap bulan sekali, adalah kayak uang kamanan dan kebersihan gitu. (Tanggal, 8 juli 2017).

Dari keterangan diatas secara tersirat dapat diketahui masih adanya pungutan liar atau pungli. Dalam hal ini pihak terkait agar pedagang merasa lebih aman dalam melakukan kegiatannya. Begitu pula dengan pembangunan yang terjadi seperti pembangunan gapura baru dan fasilitas kamar mandi yang diperbaiki. Keterangan

tersebut kurang lebih sama dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Dul, terkait dengan pelatihan atau pemberdayaan yang dilakukan. Ibu Sisna masih belum mengalami samasekali proses tersebut, sehingga dapat dikatakan masih belum optimal dan perlu dilakukan optimalisasi atas pemberdayaan tersebut agar nantinya pedagang bisa lebih siap dan lebih baik dalam menyongsong persaingan yang semakin mengglobal.

Telah disinggung diatas kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menentukan arah kebijakannya sendiri sumber daya yang ada didesa. Oleh karena itu sangat diperlukan perbaikan kedepan. Wawancara selanjutnya yang peneliti lakukan adalah dengan Kepala Desa Ketapang kepada periode ini yaitu menjelaskan tentang pengelolaan wisata Green Watu Dodol saat ini.

Dahulu memang Green Watu Dodol ini sebagian besar ya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kami hanya mengelola sebagian kecil saja di wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Wonsorejo. Wilayah itu yang kami kelola, kecil kok tempatnya. Saat ini masih ada, seperti dulu. Ada pedagangnya, ada juga petugas yang menariki tiket atau karcis masuk, ada juga yang menyediakan fasilitas kamar mandi. Memang cukup sulit untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah sini, tapi saya mencoba untuk terus memperbaiki. Sebenarnya saat ini kami coba lakukan perbaikan di wilayah desa yaitu akses parkir dan wahana permainan, dan memperbaiki perekonomian masyarakat. Tapi memang saya ada ide dan memang usulan dari berapa pihak terkait, untuk mendirikan BUMDES. Seperti nya memang itu yang menjadi prioritas pembangunan di pedesaan saat ini. Saya juga dengar kabar dananya cukup besar untuk desa yang memiliki BUMDES. Nanti kami mencoba dan berkeinginan untuk melakukan pembentukan BUMDES di Desa Ketapang mungkin untuk jenis usahanya wisata itu yang selama ini sudah kami kelola seperti yang sudah saya sebutkan tadi. (Tanggal, 8 juli 2017).

Dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak kepala Desa Ketapang diatas dapat diketahui bahwa memang dalam pengelolaan Green Watu Dodol yang dikelola oleh pihak desa masih sama. Artinya, masih belum ada perbaikan atau pengelolaan lebih lanjut. Namun dapat pula dilihat bahwa Bapak kepala desa sudah memahami dapatnya dibentuknya BUMDES yang nantinya akan menjadikan wisata Green Watu Dodol yang dikelola saat ini agar lebih maksimal. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pola kerjasama masih belum berjalan dengan baik di Desa pasir Ketapang. Pengelolaan atas aset berupa wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh desa masih minim perbaikan dan pengembangan sehingga masih belum teroptimalkan dengan baik.

Pengelolaan obyek Green Watu Dodol belum memperoleh hasil yang baik. Hal ini nampak dari masih lemahnya pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa Ketapang dalam melakukan pengelolaan hanya dilandasi dari Perdesa nomor 1 tahun 2009 tentang Pungutan Desa. Salah satu yang menjadi obyek pungutan adalah wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh Desa Ketapang. Sementara itu sebagian besar wilayah wisata Green Watu Dodol yang

memiliki obyek wisata yang memiliki pemandangan yang bagus masih dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memang secara legal formal aturan yang ada terkait dengan pengelolaan Wilayah Wisata sebagian besar dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Fasilitas yang mulai berkembang, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta ikut meramaikan pemenuhan fasilitas di wilayah wisata ini. Namun harus tetap dipahami bahwa untuk fasilitas publik di wisata Green Watu Dodol harus tetap dipimpin dan dikelola sebaik mungkin oleh pemerintah daerah.

Secara isi kebijakan atau *content policy* yang mencakup variabel kepentingan yang hendak dicapai, tipe keuntungan, tingkat perubahan yang dikehendaki, ruang pengambilan keputusan, kondisi implementor, dan dukungan sumber dana masih belum sebagaimana yang dikendaki. Melalui isi kebijakan yang ada seharusnya memberikan sarana dan ruang baru pemerintah desa Ketapang dalam lebih mengoptimalkan kembali wisata yang dikelolanya.

Khusus untuk UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah seharusnya mampu dijadikan sebagai senjata yang mampu membuat perekonomian desa dan pemberdayaan manusia wilayah desa menjadi lebih baik. Namun sejauh ini dalam hubungannya dengan wisata Green Watu Dodol masih belum dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Desa Ketapang. Hal ini nampak dari masih lemahnya perbaikan secara kelembagaan, peraturan legal formal maupun sumber daya manusia yang dilakukan.

Sesuai dengan kondisi implementor yang masih sangat lemah membuat UU Nomor 23 tahun 2014 masih belum dapat diimplementasikan untuk mendorong perbaikan wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. Sumber dana yang ada sebenarnya sangat besar jika saja Pemerintah Desa Ketapang dapat melihat peluang melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan adanya BUMDES ini kucuran dana segar dana pemerintah pusat kurang lebih 1,2 miliar akan mengguyur desa dan sebagian besar penggunaannya diprioritaskan untuk pembentukan BUMDES atau pemberdayaan masyarakat.

Ruang pengambilan keputusan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Ketapang tentu masih sangat terbatas karena sumber daya alam yang akan dikelola sebagian besar masih menjadi kewenangan dari Perusahaan Daerah. Namun dengan adanya ruang yang telah dikelola selama ini sebenarnya bisa dioptimalkan melalui bantu sarana dan prasarana maupun pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya manusia yang mendukung. Dengan adanya kesempatan akan wilayah wisata yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ketapang, akan membuat kreativitas dan inovasi masyarakat desa secara tersirat akan ikut tergali. Melalui pelatihan, pembentukan BUMDES sangat dimungkinkan perbaikan ekonomi desa secara mandiri maupun lembaga.

Dalam hubungannya dengan lingkungan kebijakan atau *context policy*, dapat dilihat masih kurangnya kemampuan implementasi kebijakan dalam hal ini. Faktor lingkungan kebijakan ini turut mengambil peran signifikan dalam kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan UU Nomor 23 tahun 2014. Lingkungan kebijakan ini meliputi faktor kekuasaan, kepentingan dan strategi keterlibatan antar aktor, karakter lembaga pelaksana/pemerintah, serta kepatuhan dan daya-tanggap lembaga pelaksana.

Pada faktor kekuasaan memperlihatkan bahwa peran Kyai di Kabupaten Banyuwangi masih sangat kuat, hal ini berpengaruh juga terhadap kepemimpinan seorang Kepala Desa yang erat hubungannya dengan kekuasaan. Sebenarnya Kepala Desa baru di Desa Ketapang adalah seorang haji, dan dalam alam sosial dan budaya di Banyuwangi seharusnya seorang haji memiliki derajat yang lebih tinggi secara sosial. Namun karena masih baru dalam mengemban amanah ini memang menjadi kelemahan. Namun melalui wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa Bapak H.Santoso, dapat diketahui visi kedepan untuk membentuk BUMDES.

Sebagaimana juga keterangan dibawah ini ketika wawancara dilakukan dengan Bapak H. Selamat tentang keinginan untuk mendirikan BUMDES yang salah satu bidang usahanya nanti adalah melalui wisata Green Watu Dodol.

Sebenarnya melalui anjuran beberapa pihak, saya berfikir, pihak desa berkeinginan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang nantinya bisa menaungi wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh Desa Ketapang. Melalui BUMDES itu memang dapat dilihat keinginan besar dari kami juga untuk melakukan pembangunan ekonomi, kan nantinya BUMDES bisa jadi badan usaha untuk memperoleh pendapatan buat desa. Kemudian nanti uangnya bisa digunakan sebagai bantuan kepada pemberdayaan masyarakat atau pembangunan, sampai sekarang kami masih belum memulai pembentukan BUMDES ini. Harapan saya dalam waktu dekat hal ini sudah bisa dilaksanakan.” (Tanggal, 8 Juli 2017).

Memang pihak Kepala Desa Ketapang sudah memiliki keinginan yang perlu diapresiasi, namun juga harus matang pembentukan BUMDES agar kinerjanya dimasa depan bisa sangat maksimal. Dapat pula dilihat bahwa pembentukan BUMDES juga merupakan andil atau dorongan dari pemerintah pusat melalui UU Nomor 23 tahun 2014. Semestinya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi harus melakukan hal yang serupa untuk mendorong perbaikan pembangunan didesa melalui upaya-upaya positif yang coba dikembangkan oleh desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat pula melakukan berbagai macam pelatihan atau program lainnya dalam mendorong perbaikan sumber daya manusia selain perbaikan secara infrastruktur, dengan demikian Green Watu Dodol dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menunjuk Pemerintah desa Ketapang dan dikelola oleh BUMDES Desa Ketapang.

Wawancara yang coba peneliti kembangkan di wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi juga menjelaskan keterangan yang sama akan masih minimnya pelatihan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak desa ataupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dalam sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata Green Watu Dodol. Keterangan itu didapatkan dari Ibu Eka sebagaimana keterangan dibawah ini.

Saya sudah berjualan disini selama kurang lebih 20 tahunan. Dulu sebelum adanya pengelolaan dari Desa saya sudah mulai memabat daerah sini, dulu disini awalnya ya kayak rawa-rawa gitu, dalam sampai

waktu itu ya saya timbun dengan tanah. Setelah itu memanag saya menyadari ini adalah tanah Pelindo, akhirnya ya ada pengelolaan dari Desa Ketapang disini. Namunn setahu saya selama ini memang ada program atau pemberdayaan berupa pelatihan, tapi saya sendiri kurang memahami maksud dan tujuannya, saya juga merasa masih sangat kurang sekali perhatian pemerintah ini terhadap wong cilik kayak saya ini. Saya disini ibaratnya kan sudah lama ya tidak merasakan dampak positifnya, mungkin untuk yang berduit ya neka saja tinggal bangun hotel, rumah makan kayak gitu. (Tanggal, 9 juli 2017).

Keterangan yang kurang lebih sama juga dilontarkan oleh Bapak Poniran, yang memberigambaran tentang pengeloan wisata Green Watu Dodolsebagai berikut,

Saya dagang disini sudah sejak 6 tahun lalu. Saya rasa yang mengelola memang desa. Pak Aan itu biasa jaga parkir atau yang menarik retribusi disini. Namunn sejauh ini saya rasa kalau program-program seperti itu masih belum ada. Saya masih belum merasakan dampaknya. Kami berjualan disini lalu ada retribusi buat desa setiap bulannya. Itu pun yang menarik kadang tidak tentu sehingga ya kadang ada kadang ya nuggak beberapa hari kalau lagi sepi. Kalau hari biasa memang sepi disini, beda sama hari libur atau Tanggal merah. (Tanggal, 9 Juli 2017).

Sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh kedua pedagang di Area Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi memberikan pemahaman bahwa masih sangat minim pemberdayaan yang dilakukan diwilayah ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terutama bagi pedagang kecil yang ada. Perlu adanya pemahaman atas berbagai komponen yang memiliki kepentingan di obyek wisata yang dikelola desa ini agar pembangunan wisata Green Watu Dodol yang dimiliki Desa Ketapang ini akan bisa lebih optimal dikemudian hari.

Melalui optimalisasi berbasiskan sumber daya manusia sangat dimungkinkan untuk mewujudnya berbagai macam bentuk perbaikan-perbaikan yang akan terjadi. Sementara ini memang hal ini masih belum berjalan dengan baik. Bahkan pegelolaan Green Watu Dodol juga masih jauh dari kata maksimal, sehingga membutuhkan kecakapan sumber daya manusia dan modal untuk menunjang hal itu secara berkesinambungan.

Sebagai bagian dari observasi yang telah dilakukan akan disajikan beberapa foto hasil observasi lapangan yang telah dilakukan peneliti. Foto-foto yang berhasil dikumpulkan merupakan lokasi yang telah peneliti observasi sebelumnya, baik untuk memperoleh data maupun memverifikasi data yang telah diperoleh sebagai berikut.

Tiket masuk sekaligus pintu masuk Wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Melalui keterangan bapak Aan selaku petugas penarik tiket yang berada dilokasi menjelaskan beberapa informasi sebagai berikut.

Selamaini saya sudah bekerja dipenarikan tiket disini sejak 10 tahun lalu. Memang disini dikelola pemerintah desa yang begini keadaann-

ya. Namunn pemasukannya lumayan, ya saya juga digaji melalui pendapatan tiket masuk disini, istri saya juga berjualan disini. Sebagaimana diketahui bahwa memang fasilitasnya masih minim, dan beberapa pedagang sendiri yang membangun lapaknya untuk berjualan. Kalau masalah pemberdayaan kepada pedagang, dulu ada sosialisasi pungutan desa, tapi sudah beberapa tahun lalu. Kalau sekarang ya masih belum ada. Memang saya mendengar akan mau dijadikan BUMDES tapi masih belum jelas. (Tanggal, 8 juli 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan destinasi wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ketapang lumayan meningkat, bahkan pembangunan terus berjalan, seperti ada yang membantu dari CSR pertamina dan semen. Dapat dilihat kepada fasilitas yang tersedia dan bentuk-bentuk bangunan yang ada cukup ada perbaikan, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Kegiatan yang berbentuk mengoptimalkan sumber daya manusia juga masih kurang sehingga membuat pedagang atau masyarakat sekitar menjadi kurang berkembang, bahkan yang terakhir dilakukan hanya terkait pungutan desa bukan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu pedagang yang telah peneliti wawancarai dalam rangka memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Melalui Bapak Poniran peneliti akhirnya bisa bertemu Bapak Aan yang merupakan penjaga tiket yang sudah cukup lama bekerja di Wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan keterangan dari Bapak Poniran diketahui bahwa pengelolaan wisata memang belum banyak mendapat sorotan dari pemerintah desa. Karena memang belum ada badan secara khusus yang ditugaskan untuk melakukan optimalisasi wisata ini.

Ide dan gagasan dari Kepala Desa ini patut diapresiasi, melihat pembangunan yang masih stagnan dan perlu diotimalkan melalui pembangunan dan pemberdayaan yang lebih massif. Sebenarnya bisa juga dilakukan kerjasama dengan desa lain atau pihak ketiga dalam upaya optimalisasi ini. Dan Pak Selamat selaku Kepala Desa Ketapang juga sudah memahami kebijakan ini bisa dilaksanakan melalui kerjasama. Namunn memang akan tetap membutuhkan wadah atau badan secara formal, disini dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia di Desa Ketapang untuk mensukseskan hal tersebut.

Wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Eka memberi keterangan yang samadengan Bapak Poniran sebagaimana dalam penelitian ini dilakukan. Pemberdayaan bagi pedagang masih sangat minim dilakukan, apa lagi terhadap masyarakat desa lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan wisata Green Watu Dodol. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang besar dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk melakukan sesegera mungkin guna mendorong Desa Ketapang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dapat lebih dimaksimalkan lagi.

Sumber daya sesungguhnya bagi bangsa Indonesia adalah sumber daya manusianya. Apalagi jika ditambah dengan sumber daya alam yang melimpah, tentu itu merupakan karunia yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tidak terkecuali bagi Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Sesuai dengan hal ini menjadi menarik untuk melihat secara umum kesiapan masyarakat atau sumber

daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola pariwisata.

Membahas mengenai sebuah obyek wisata tentu akan berkaitan dengan banyak hal seperti: budaya, sosial, kerajinan, keagamaan, sejarah dan lain sebagainya. Dalam hal ini Wisata Pasir Green Watu Dodol merupakan salah satu destinasi tujuan wisata alam yang populer di Kabupaten Banyuwangi.

Memang jika dilihat dari segi pertumbuhan manusia-nya, Kabupaten Banyuwangi terus tumbuh dan berkembang. Dalam upaya pengentaskan masalah buta huruf dan pendidikan 9 tahun juga terus digalakkan. Melalui pendidikan, sangat dimungkinkan masyarakat akan menemui kebaikannya. Melalui pendidikan pula masyarakat akan lebih berdaya, keratif dan inovatif. Dalam upaya mendorong perbaikan masyarakat secara berkala dan berkelanjutan maka dibutuhkan sebuah upaya serius dan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam upaya mendongkrak sektor pariwisata warga atau masyarakat Banyuwangi harus ikut dilibatkan dalam upaya ini secara terus menerus. Agar lebih dapat mengoptimalkan sektor pariwisata.

Keterangan serupa juga peneliti peroleh melalui Bapak Aan terkait masalah sumber daya manusia yang ada di Desa Ketapang, sebagai berikut.

Kalau tingkat pendidikan anak-anak disini kebanyakan SMA, kalau yang lanjut kuliah memang masih sangat minim. Ada beberapa namun jumlahnya masih sangat sedikit. Kalau untuk yang sudah tua bahkan masih banyak yang tidak bisa baca tulis tapi jika baca Al-Quran lancar sekali. Ini memang sudah disadari masyarakat, saya juga terus mendorong setidaknya anak saya supaya hidupnya ya minimal lebih baik dari kepada bapaknya ini. Yang paling sering itu memang adanya keinginan untuk membantu kehidupan ekonomi orang tua sehingga anak terpaksa kerja, ada yang hanya lulus SD, tapi sekarang kebanyakan sudah lulus SMA semua. (Tanggal, 8 juli 2017).

Berdasarkan keterangan diatas dapat diperoleh informasi bahwa memang terjadi peningkatan atas kesadaran pentingnya pendidikan di Banyuwangi. Khususnya di Desa Ketapang. Namun memang sumber daya manusia yang ada masih harus terus ditingkatkan lagi terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata. Peduduk yang memahami pentingnya pariwisata akan memiliki keseriusan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri atau menjadi tenaga profesional untuk menunjang pariwisata daerah Ketapang.

Kendala dan Pendukung dalam Pengelolaan Green Watu Dodol di Banyuwangi

Banyak kendala yang dihadapi untuk mengembangkan desa wisata di Kabupaten Banyuwangi, salah satunya karena dana. Karena selama ini desa wisata yang sudah ada, merintis dengan dana swadaya masyarakat.

Sejauh ini, peran pemerintah dalam mengembangkan desa wisata masih belum maksimal. Selain karena dana, minimnya pengetahuan warga tentang pengelolaan pariwisata juga menjadi kendala. Dari pusat juga belum terpolakan, standar desa

wisata itu seperti apa, Profesionalitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola pariwisata perlu ditingkatkan. Alokasi dana keistimewaan (danais) lanjutnya, diharapkan lebih banyak untuk mengembangkan desa wisata ini.

Kendalanya sebagai berikut:

1. Belum lengkapnya dukungan wisata seperti wahanya yang kurang.
2. Toilet yang kurang banyak
3. Pusat makanan yang masih ada pedagang yang menggunakan bangunan semi permanen sehingga kelihatan kumuh.
4. Tidak ada pusat informasi
5. Penghijauannya kurang, apalagi dimusim panas kelihatan rumput menguning, karena tidak ada pembasahan lahan.

Selanjutnya pendukung dalam desa wisata yang ada di Green Watu Dodol Adalah sebagai berikut:

1. Akses desa wisatanya sangat bisa diakses karena letaknya ada dipinggir jalan raya nasional.
2. Pemerintah desa mengelola dengan keterbukaan administrasi.
3. Kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan juga prinsip untuk terus mengembangkan desa wisata di Green Watu Dodol Banyuwangi.
4. Terbentuknya BUMDES untuk pengelolaan desa Ketapang yang ada dikabupaten Banyuwangi.

Pola Kerjasama

Pola kerjasama ini dilakukan dengan PT.Pelindo dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta Pemerintah Desa Ketapang, adapun lebih rinci pola kerjasamanya sebagai berikut:

1. PT.Pelindo hanya penyedia lahan artinya PT.Pelindo yang mempunyai lahan.
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pengelola pariwisata WatuDodol dengan manajemennya serta pengelolaan SDM dilapangan itupun ditugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata serta dispenda.
3. Pemerintah desa hanya bagian memberikan SDM terbaik di wilayah desa serta memberikan produk-produk ekonomi kreatifnya melalui BUMDESnya.
4. Bagi hasil yang dijalankan adalah PT.Pelindo diberi persentase dari hasil.
5. Jumlah pembagian keuntungan adalah diberikan kepada pemerintah kabupaten 20% pengelola 50% termasuk desa 30% ke PT.pelindo.
6. Modalnya dari pemerintah kabupaten Banyuwangi dan dibantu oleh CSR perusahaan sekitar seperti PT.Pertamina,PT semen indonesia, PT Bosowa dan PT Telkom.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan pengelolaan wisata Green Watu Dodol, menunjukkan hasil yang positif. Hasil ini merupakan akibat dari pembangunan wisata yang terus dibangun. Namun, masih butuh perawatan yang baik, dari segi fasilitas dan pembangunan obyek wisata bagi

wisatawan. Kurangnya kesiapan dari masyarakat dan Pemerintah Desa Ketapang juga menjadikan masalah tersendiri yang perlu segera dibenahi.

Dengan adanya pengelolaan Green Watu Dodol dikelola Desa sebenarnya sangat dimungkinkan pengelolaan ini lebih maksimal untuk menjawab tantangan yang ada. Memang dalam hal ini kekurangsiapan Pemerintah Desa Ketapang dalam melihat peluang di dalam UU 23 tahun 2014 menjadikan wisata Green Watu Dodol masih belum bisa berkembang secara optimal.

Salah satu penguatan secara kelembagaan untuk meningkatkan kinerja wisata Green Watu Dodol adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagaimana telah diamankan oleh UU Desa. Melalui BUMDES dimungkinkan desa untuk mengelola secara mandiri, maupun bekerjasama dengan desa lain atau dengan pihak ketiga. Melalui penguatan ini juga sangat dimungkinkan dana besar dalam bentuk alokasi dana desa akan bisa digunakan sebagai penguat pembangunan wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh Desa Ketapang.

Pengembangan wisata Pantai Green Watu Dodol menjadi obyek wisata yang berkualitas dan berkelanjutan, harus ada dukungan dana yang dapat diperoleh dari bantuan Pemda dan pemerintah Pusat serta pengelolaan sumber pendapatan yang diperoleh dari obyek wisata Green Watu Dodol harus dikelola secara profesional dan proporsional, Pengaturan lokasi hotel, restoran, mini market, art shop dan toko/warung masih harus ditata lagi dengan merelokasi ke tempat terpisah dengan daerah zona inti dan zona penyangga, namun harus berada di daerah pengembangan, Kurang optimalnya pengaturan tempat atau lokasi berdirinya sarana dan prasarana terkait yang terlalu dekat dengan bibir pantai, sehingga keindahan tepi pantai terhalangi oleh tempat-tempat tersebut, Kontribusi obyek wisata Green Watu Dodol belum sepenuhnya memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, maka perlu adanya peningkatan strategi pemasaran dan promosi yang tepat untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang justru akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar serta meningkatkan jumlah lapangan kerja. Promosi yang dilakukan masih belum optimal dan memerlukan kontinuitas dengan program-program yang lebih tepat, baik secara nasional dan internasional. Kedepan pengelolaan harus mandiri (*Independently Management*) yang dilakukan oleh manajemen pengelola Green Watu Dodol, namun juga perlu dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah dan pusat, Peran serta dan dukungan masyarakat lokal masih harus ditingkatkan guna mendukung terwujudnya pariwisata yang berbasis kerakyatan (*tourism based Community*) yang mampu memenuhi segala harapan dan aspirasi masyarakat lokal, sarana dan prasarana harus mampu menciptakan kepuasan wisatawan dan mampu memotivasi wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan wisata yang diminati. Mutu pelayanan (*service*) kepada wisatawan harus tetap ditingkatkan, dengan cara tidak mendiskriminasi antara wisatawan nusantara dengan wisatawan mancanegara. Kualitas sumber daya manusia pengelola dan pemberi jasa di obyek wisata Green Watu Dodol perlu ditingkatkan melalui pendidikan kepariwisataan dan pelatihan.

SIMPULAN

Berdasarkan kepada penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pola kerjasama Green Watu Dodol dengan PT.Pelindo masih belum berjalan dengan baik di Desa Ketapang.Hal ini dapat diketahui melalui masih stagnannya pembangunan yang ada di lokasi wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ketapang.

Belum dibentuknya lembaga atau BUMDES dalam melaksanakan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan amanat UU Desa menjadi salah satu akibat masih lemahnya pemahaman pemerintah desa. Ditambah dengan masih jarangnnya pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di sekitar wisata Green Watu Dodol masih jarang dilakukan.

Sumber daya manusia yang masih rendah membuat pengelolaan dan pengembangan menjadi terhambat.Hal ini ditambah pula dengan lemahnya struktur birokrasi pemerintah yang ada.Pemerintah Desa Ketapang masih belum melakukan bentuk-bentuk pengoptimalan sebagaimana yang ada di UU Desa, sehingga dapat dikatakan pengelolaan Green Watu Dodol masih belum ada perubahan ketika belum adanya UU Desa maupun setelah terbentuknya UU Desa.

Pengelolaan Green Watu Dodoldikelola oleh desa, dengan sistem bagi hasil, dengan pola yang sederhana. Jika pengelolaan Green Watu Dodoldikelola oleh swasta atau pengembang, maka tidak dipungkiri akan meningkat terus dari tahun ketahun. Tetapi melihat, dari pengelolaan yang sederhana ini cukup lumayan peningkatan PAD dari wisata Green Watu Dodol ini, maka peran swasta dalam pengembangan objek wisata ini harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

SARAN

Rekomendasi yang bisa diberikan disini adalah untuk segera mungkin mendirikan BUMDES di Desa Green Watu Dodol. Dengan adanya BUMDES ini akan menjadikan lebih profesional lagi pengelolaan wisata Green Watu Dodol yang dikelola oleh desa. Mengingat pula bahwa pemerintah pusat akanmemberi dana dalam jumlah besar bagi desa yang memiliki BUMDES di tingkat desa guna mengelola dan meningkatkan sumber daya alam yang dimiliki. Tentu hal ini akan berdampak kepada semakin baiknya pengembangansumber daya manusia yang ada desa.

Adapun rekomendasi untuk pengambil kebijakan:

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapakan membuat badan usaha khusus menangani wisata Green Watu Dodol sehingga peningkatan wisata terus meningkat.
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus terus mengembangkan promosi wisata khususnya Green Watu Dodol.
3. Melalui Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan mempunyai lahan disekitar Green Watu Dodol untuk memudahkan akses oleh-oleh bagi orang yang berlibur dari Banyuwangi maupun dari Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Albab, U. (2007). *Kebijakan Publik: Teori, Konsep dan Kajian Akademik*. Surabaya: ITSPress.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahuri et al. (2001). *Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Bogor: Pradnya Paramaita.
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwijowiyoto, R.N. (2008). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Fauzi, A., Beria, L., & Muhtadi. (2005). *Strategi Pengembangan Pembayaran Dan Imbal Jasa Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Lokakarya Nasional.
- Hadari, N. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keraf, G. (2000). *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L.J. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Terjemahan oleh Tjun Surjaman*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nikijuluw, V.P.H. (2002). *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: Kerjasama P3R dan PT. Pustaka Cidesindo.
- Silalahi, O. (1989). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman. (1998). *Media Pendidikan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sutopo, H.B. (2006). *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S.A. (1990). *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, S.A. (1997). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Wahab, S.A. (1999). *Ekonomi Politik Pembangunan; Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan Di Tengah Krisis Moneter*. Malang: PT Danar Wijaya Brawijaya University Press.
- Wahab, S.A. (2012). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Gr
- Zamani, N. P., & Darmawan. (2000), *Community-Based Management (CBM)*